



Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Krisis Suriah

Adirini Pujayanti^{*)}

Abstrak

Masyarakat internasional mengucilkan Suriah setelah krisis politik yang telah berlangsung lebih dari 14 bulan di negara tersebut menewaskan lebih dari 7.500 orang warga negaranya. Puncak kemarahan dunia adalah terjadinya 'Tragedi Houla' di Provinsi Homs, dengan korban lebih dari 100 orang warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak akibat pembantaian pihak militer. Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga saat ini belum berhasil mencari solusi damai atas masalah Suriah, sehingga upaya mengatasi krisis politik di Suriah melalui cara intervensi militer mulai dipertimbangkan. Terkait dengan krisis Suriah, Indonesia juga perlu mengambil kebijakan secara bijaksana dengan mempertimbangkan keberadaan WNI yang ada di Suriah.

Pendahuluan

Houla, kota kecil di daerah pedesaan pertanian miskin di provinsi Homs Suriah menjadi perhatian dunia, setelah terjadi tragedi pembantaian lebih dari 100 orang penduduk sipil oleh militer pada Jumat 25 Mei 2012 lalu. Kemarahan dunia muncul karena mayoritas korban adalah wanita dan anak-anak yang dibunuh dengan cara sangat kejam. Ada bukti kuat milisi *shabbiha* yang pro pemerintah terlibat dalam pembantaian tersebut. Pemantau PBB menemukan bukti-bukti keterlibatan militer berupa peluru artileri, tank, termasuk bangunan yang hancur oleh senjata berat dalam tragedi Houla. Kecaman dan kemarahan dunia atas tragedi Houla diikuti dengan pengusiran negara-negara Barat terhadap para diplomat Suriah. Suriah membalas tindakan tersebut dengan

pengusiran duta besar dan staf kedutaan 17 negara, termasuk AS dengan *persona non grata* (tidak diinginkan).

Belum reda keprihatinan dan kecaman dunia terhadap Suriah, kembali terjadi pembunuhan missal di Al-Kubeir wilayah Hama, salah satu pusat konflik senjata antara pasukan pemerintah dan oposisi. Pihak oposisi memperkirakan korban meninggal lebih dari 55 orang warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Milisi *shabbiha* kembali dituduh sebagai pelakunya dan Pemerintah Assad kembali membantah tuduhan tersebut. Upaya pemantau PBB untuk datang ke Hama gagal karena dihalangi dengan tembakan dari pihak pemerintah dan oposisi. Pemerintahan Bashar al Assad terus menyalahkan teroris dan pihak ekstremis atas pertumpahan darah yang terjadi di Suriah dan menyatakan pihak asing

^{*)} Peneliti Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: adirini.pujayanti@dpr.go.id

memiliki agenda untuk menghancurkan pemerintahan dan negaranya.

Jalan Buntu Perdamaian

Utusan khusus PBB dan Liga Arab untuk Suriah, Kofi Annan, mengalami kebuntuan untuk menghentikan pertikaian di Suriah, setelah usul enam agenda perdamaian yang diajukannya gagal diterapkan. Dewan HAM PBB mengadakan pertemuan pembahasan khusus membahas pelanggaran HAM di Suriah atas permintaan negara anggotanya. Sementara, Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB kembali bersidang dalam sebuah rapat tertutup untuk mengajukan usul baru bagi Suriah. Sebagai langkah lanjut, Annan menyiapkan rencana baru dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat sipil, perwakilan oposisi, negara yang pro maupun kontra kepada Pemerintahan Assad untuk duduk bersama mencari solusi damai bagi Suriah.

Intensitas perang saudara di Suriah akan semakin meningkat karena Tentara Pembebasan Suriah (FSA) telah memberi tenggat waktu kepada Pemerintahan Assad untuk memenuhi rencana perdamaian internasional yang diajukan PBB. Pemerintahan Assad mengizinkan relawan Palang Merah Internasional masuk ke negaranya, namun menolak gencatan senjata. Presiden Assad menegaskan, kesuksesan usulan perdamaian PBB-Liga Arab sangat tergantung keberhasilan pemerintahannya memberantas apa yang disebutnya sebagai aksi teroris dan penyelundupan senjata. Pemerintahan Assad selama ini masih mendapat dukungan dari Rusia, China dan Iran. Kedua negara meyakini solusi atas krisis Suriah dapat tercapai melalui cara dialog damai dalam perundingan. Mereka tidak mendukung penjatuhan rezim Assad secara paksa karena dikawatirkan akan memicu gelombang balas dendam dari kaum Sunni terhadap minoritas Alawite pendukung Assad yang kini memimpin posisi penting di pemerintahan dan militer.

Di lain pihak, AS mulai menyerukan intervensi militer internasional di Suriah. Dalam pandangan AS, jika DK PBB tidak

mengambil tindakan tegas, negara-negara anggota bisa bertindak tanpa PBB. Gerakan negara-negara Barat yang dipimpin AS terus mengkaji opsi, di antaranya intervensi militer atas nama masyarakat internasional. AS telah memimpin latihan perang di Jordania dekat perbatasan Suriah dengan melibatkan 11.000 tentara dari 19 negara. Latihan perang bertajuk "Singa Siaga" ini menjadi persiapan untuk intervensi militer cepat di Suriah, dan mencegah senjata kimia dan biologi di negara tersebut jatuh ke tangan teroris jika rezim Assad tumbang.

Kebijakan Indonesia

Sikap Indonesia dalam krisis Suriah sangat jelas, menolak kekerasan terhadap masyarakat sipil dan mendukung solusi damai yang mencerminkan aspirasi rakyat Suriah. Indonesia mendukung upaya PBB dalam mencari solusi damai dan menekankan perlu dilakukan suatu konferensi internasional yang bersifat inklusif untuk menyatukan pandangan masyarakat internasional dalam masalah Suriah. Indonesia pernah menarik Duta Besar di Suriah di awal tahun ini sebagai bentuk kecaman terhadap aksi kekerasan yang terus terjadi di negara tersebut. Namun, Pemerintah Indonesia kembali mengirim Dubes Indonesia ke Suriah menyusul keberadaan personel TNI dan Polri yang tengah bertugas sebagai tim peninjau PBB di Suriah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan mereka. Indonesia tidak akan mengusir perwakilan Suriah di Jakarta, dengan keyakinan dalam situasi yang terus memburuk kedua negara justru harus mempertahankan komunikasi untuk menyampaikan keprihatinan Indonesia terhadap Suriah. Pemerintah Indonesia menunjukkan keprihatinan terhadap pembunuhan warga sipil yang terus terjadi dengan memanggil Kuasa Usaha Suriah untuk Indonesia, Basam al-Khatib terkait tragedi Houla.

Namun Komisi I DPR menilai, Pemerintah tidak tegas dalam mengambil kebijakan politik terhadap Suriah. Indonesia harus lebih aktif dalam upaya penyelesaian konflik di negara Timur Tengah. Sebagai

negara demokratis dan negara berpenduduk Islam terbesar, Indonesia dapat berperan penting dalam menyikapi perkembangan di Suriah. Melihat kekerasan sistemik yang berkelanjutan di Suriah Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap politik yang lebih tegas dan mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Liga Arab untuk memberikan sanksi berat kepada Pemerintahan Bashar Al-Assad.

Pemerintah Indonesia memilih untuk berperan aktif dalam proses penghentian kekerasan dengan menjadi bagian dari tim peninjau PBB. Indonesia merupakan salah satu dari sejumlah negara yang diminta PBB untuk mengirimkan tim pemantau ke Suriah. PBB menilai Indonesia memiliki tenaga yang kompeten mengawasi gencatan senjata antar dua pihak bertikai di Suriah. Saat ini ada 16 perwira Indonesia baik dari Kepolisian atau TNI yang bertugas sebagai pemantau di Suriah. Tim Pemantau PBB berjumlah sekitar 300 personel. Dimulai dengan Tim Pendahulu yang terdiri dari 30 orang pemantau, termasuk 6 personel dari Indonesia. Kemudian Tim Pemantau PBB di tahap kedua akan diperkuat sehingga berjumlah 300 personel dari berbagai negara. Dalam tahap kedua ini Indonesia pun tengah menyiapkan 10 personel tambahan.

Kebijakan Indonesia untuk tetap mempertahankan hubungan diplomasi dengan Suriah dilakukan dengan pertimbangan jumlah warga negara Indonesia yang berada di negara tersebut cukup besar. Melihat intensitas kekerasan di Suriah yang terus meningkat, keamanan WNI di negara tersebut kini menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri. Data dari Kantor Imigrasi Suriah menyatakan terdapat sekitar 80.000 WNI di negaranya. Namun KBRI hanya mempunyai data 12.000 WNI terdiri dari diplomat, ekspatriat, mahasiswa, dan selebihnya adalah TKI informal. Konsentrasi terbanyak warga Indonesia ada di ibukota Damaskus dan Aleppo yang merupakan kota bisnis terbesar kedua di Suriah. Sejak bulan Januari lalu, Pemerintah Indonesia telah mulai melakukan evakuasi secara bertahap terhadap WNI di Suriah yang kondisi keamanannya telah terancam. Evakuasi

bertahap dilakukan karena banyak WNI terutama Tenaga Kerja Indonesia Pekerja Laksana Rumah Tangga (TKI PLRT) yang belum terdata. Selama ini KBRI kesulitan melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah pasti mereka. Kontak dengan TKI hanya dapat dilakukan melalui hubungan telepon yang semakin sulit dilakukan karena putusnya jaringan komunikasi. Upaya menjalin kontak langsung dengan para TKI tidak dapat dilakukan tanpa surat persetujuan Kemenlu Suriah ke daerah konflik.

Dalam evakuasi sembilan tahap hingga 31 Mei lalu telah 233 WNI yang dipulangkan ke Tanah Air. Proses evakuasi hanya dapat dilakukan melalui jalan darat dengan kendaraan roda empat karena rel kereta api telah hancur dan jalur penerbangan sudah ditutup. KBRI berharap WNI segera keluar dari daerah-daerah konflik karena saat ini perbatasan ke negara Yordania masih bisa dilalui. Dari Yordania para WNI tersebut akan diterbangkan ke Tanah Air. Evakuasi WNI, khususnya TKI dilaksanakan setelah semua proses yang berkaitan dengan peraturan pemerintah Suriah untuk pemulangan mereka diselesaikan. Hal ini tidak mudah dilakukan karena pada umumnya paspor TKI dipegang oleh majikan. TKI harus mendapat izin dari majikan untuk pulang dan memastikan kontrak kerja sudah berakhir dan tak tersangkut kasus kriminalitas. Sedangkan WNI yang menjadi mahasiswa di sejumlah universitas di Damaskus memilih bertahan demi menyelesaikan pendidikan mereka. Menurut mereka krisis Suriah tersebut tidak berpengaruh pada mahasiswa asing, terutama yang berasal dari Asia Tenggara.

Penutup

Melihat situasi keamanan Suriah yang semakin tidak kondusif, Pemerintah Indonesia, khususnya kementerian luar negeri, harus segera memantapkan rencana evakuasi besar-besaran WNI di Suriah, termasuk alokasi dananya. Kemenlu harus bisa menetapkan eskalasi situasi di Suriah yang akan dijadikan patokan untuk proses evakuasi besar-besaran WNI. Pemulangan

bertahap WNI harus direncanakan secara matang, dengan menyiapkan titik tempat berkumpul dan jalur evakuasi yang aman.

Pemerintah Indonesia memiliki pengalamanketika menghadapi krisis politik di Sudan, Libya, dan Mesir. Ketiadaan data selalu menjadi alibi pemerintah Indonesia yang menyebabkan evakuasi lambat. Kemenlu dan Kemenakertrans harus bekerja sama, karena semestinya Kemenakertrans bisa segera menginstruksikan seluruh Disnaker di seluruh Indonesia untuk membuka pengaduan bagi keluarga buruh migran di Suriah. Dalam kesepakatan kerja TKI selama ini tak diatur soal *force majeure* (peristiwa di luar dugaan, seperti perang dan bencana alam), KBRI harus mengupayakan agar gaji dan hak-hak TKI terpenuhi sebelum mereka pulang.

Rujukan:

1. "Insiden Houla Titik Balik Krisis," *Kompas*, 30 Mei 2012.
2. "Annan-Assad Diskusikan Perdamaian Suriah," *Republika*, 30 Mei 2012.
3. "Syrian Diplomats Around the World Expelled," *The Jakarta Post*, 30 Mei 2012.
4. "PBB Gagal Hentikan Suriah," *Republika*, 31 Mei 2012.
5. "12.000 WNI di Suriah," *Kompas*, 31 Mei 2012.
6. "Friends and Critics See A Threat to Annan's legacy," *IHT*, 31 Mei 2012.
7. "U.N. Rights Body to Meet on Syria Killings," *IHT*, 31 Mei 2012.
8. "Ultimatum Pemberontakan untuk Rezim Al-Assad," *Media Indonesia*, 1 Juni 2012.
9. "Aksi militer Dimungkinkan," *Kompas*, 1 Juni 2012
10. "Assad Bantah Terlibat di Houla," *Kompas*, 4 Juni 2012.
11. "UE Tekan Rusia Soal Suriah," *Kompas*, 5 Juni 2012.
12. "Uni Eropa Kepung Putin Soal Suriah," *Republika*, 5 Juni 2012.
13. "Suriah Usir Duta Besar AS," *Suara Pembaruan*, 6 Juni 2012.
14. "Annan Pursues New Syria Plan," *The Wall Street Journal*, 7 Juni 2012.
15. "Puluhan Warga Hama Dibantai," *Kompas*, 8 Juni 2012.
16. "KBRI Kesulitan Kontak WNI," *Kompas*, 11 Juni 2012.